



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

A; Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

a; Tugas Pokok Sekretariat Daerah

Tugas pokok Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP dan Lembaga Lain daerah.

b; Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, SETDA menyelenggarakan fungsi :

- a; Penyusunan bahan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b; Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, badan perencanaan Pembangunan daerah, inspektorat, lembaga teknis daerah, SATPOL PP dan lembaga lain daerah;
 - c; Pelaksanaan sebagian urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah dan persandian;
 - d; Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - e; pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah;
 - f; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c; **Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah**

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

1; **Sekretaris Daerah;**

2; **Asisten Pemerintahan,** membawahkan :

a; **Biro Tata Pemerintahan,** membawahkan :

1; Bagian Tata Pemerintahan Umum, membawahkan :

1; Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

2; Sub Bagian Pemerintahan Umum;

3; Sub Bagian Tata Usaha Biro.

2; Bagian Pemerintahan Desa, Kelurahan Dan Kependudukan, membawahkan :

1; Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

2; Sub Bagian Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa Dan Kelurahan;

3; Sub Bagian Kependudukan Dan Catatan Sipil.

3; Bagian Pertanahan, Ketentraman Dan Ketertiban, membawahkan :

1; Sub Bagian Fasilitasi Pertanahan;

2; Sub Bagian Ketentraman dan Ketertiban;

4; Bagian Administrasi Penataan Wilayah, membawahkan :

4; Bagian Kerjasama Luar negeri, membawahkan :

1; Sub Bagian kerjasama pemerintahan Daerah dengan Lembaga Pemerintah Luar Negeri

2; Sub bagian Kerjasama Pemerintahan Daerah Dengan Lembaga Non Pemerintah Luar Negeri

c; **Biro Hukum**, membawahkan :

1; Bagian Peraturan Perundang-Undangan, membawahkan :

1; Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah

2; Sub Bagian Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur

3; Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum.

2; Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahkan :

1; Sub Bagian Sengketa Hukum;

2; Sub bagian Bantuan Hukum;

3; Sub Bagian Hak Asasi Manusia

3; Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum, membawahkan :

1; Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum

2; Sub Bagian Sosialisasi Hukum

3; Sub Bagian Tata Usaha Biro

4; Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah,
membawahkan :

1; Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah
Wilayah I .

2; Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah
Wilayah II .

3; Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah
Wilayah III.

3; **Asisten Ekonomi Dan Pembangunan**, membawahkan:

a; **Biro Administrasi Pembangunan**, membawahkan:

1; Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan, membawahkan :

1; Sub Bagian Pengendalian Administrasi
Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi .

2; Sub Bagian Pengendalian Administrasi
Pelaksanaan Pembangunan Pemerintahan dan
Kesejahteraan .

3; Sub Bagian Pengendalian Administrasi
Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Dan
Tata Ruang .

2; Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan Wilayah , membawahkan :

- 1; Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I.
- 2; Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II.
- 3; Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III .

3; Bagian Pelaporan Dan Analsis Pelaksanaan Pembangunan, membawahkan :

- 1; Sub Bagian Palaporan Dan Analsis Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur .
- 2; Sub Bagian Palaporan Dan Analsis Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Kesejahteraan.
- 3; Sub Bagian Tata Usaha Biro

b; **Biro Perekonomian**, membawahkan :

1; Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

- 1; Sub Bagian Perindustrian Dan Perdagangan
- 2; Sub Bagian Koperasi dan UMKM

2; Bagian Sarana Perekonomian, membawah- kan:

- 1; Sub Bagian Promosi Daerah dan Pariwisata;
 - 2; Sub Bagian Infrastruktur Dan Perhubungan.
 - 3; Bagian Investasi Dan BUMD, membawahkan :
 - 1; Sub Bagian Investasi dan BUMD Bidang Keuangan
 - 2; Sub Bagian Investasi dan BUMD Bidang Jasa dan Produksi
 - 3; Sub Bagian Tata Usaha Biro
- c; **Biro Bina Produksi**, membawahkan :
- 1; Bagian Pertanian, membawahkan :
 - 1; Sub Bagian Pertanian, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
 - 2; Sub Bagian Peternakan, Perikanan dan Kelautan
 - 2; Bagian Kehutanan Dan Lingkungan Hidup;
 - 1; Sub Bagian Kehutanan Dan Pelestarian Alam
 - 2; Sub Bagian Lingkungan Hidup
 - 3; Sub Bagian Tata Usaha Biro
 - 3; Bagian Energi Dan Sumber Daya Mineral
 - 1; Sub Bagian Energi;
 - 2; Sub Bagian Sumber Daya Air Dan Mineral;

3; Sub Bagian Tata Usaha Asisten Ekonomi Dan Pembangunan

4; **Asisten Kesejahteraan Rakyat**, membawahkan :

a; **Biro Bina Sosial**, membawahkan :

1; Bagian Kesejahteraan Sosial Dan Penanggulangan Bencana, membawahkan :

1; Sub Bagian Kesejahteraan Sosial

2; Sub Bagian Penanggulangan Bencana

3; Sub Bagian Tata Usaha Biro

2; Bagian Kesehatan, dan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, membawahkan :

1; Sub Bagian Kesehatan

2; Sub Bagian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

3; Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan Kemiskinan Dan Keluarga Berencana, membawahkan :

1; Sub bagian Pemberdayaan Masyarakat.

2; Sub Bagian Penanggulangan Kemiskinan

3; Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

b; **Biro Bina Mental**, membawahkan :

1; Bagian Agama, Kebudayaan dan Kesenian,
membawahkan :

- 1; Sub Bagian Agama
- 2; Sub Bagian Kebudayaan Dan Kesenian
- 3; Sub Bagian Tata Usaha Biro

2; Bagian Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga,
membawahkan :

- 1; Sub Bagian Pendidikan
- 2; Sub Bagian Pemuda Dan Olah Raga
- 3; Sub Bagian Tata Usaha asisten Adminis-trasi.

5; **Asisten Adminsitrasi**, membawahkan :

a; **Biro Organisasi Dan Kepegawaian**, membawahkan :

1; Bagian Kelembagaan, membawahkan :

- 1; Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah
- 2; Sub Bagian Fasilitasi Kelembagaan
- 3; Sub Bagian Analisis dan Formasi Pegawai

2; Bagian Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah,
membawahkan :

- 1; Sub Bagian Akuntabilitas Aparatur
- 2; Sub Bagian Pengembangan Aparatur

3; Bagian Ketatalaksanaan, membawahkan :

- 1; Sub Bagian Fasilitasi Ketatalaksanaan;
- 2; Sub Bagian Pelayanan Publik
- 3; Sub Bagian Tata Usaha Asisten Administrasi

4; Bagian Kepegawaian, membawahkan :

- 1; Sub Bagian Mutasi dan Pengembangan
- 2; Sub Bagian Umum Kepegawaian
- 3; Sub Bagian Tata Usaha Biro

b; **Biro Keuangan**, membawahkan :

1; Bagian Anggaran, membawahkan :

- 1; Sub Bagian Anggaran Bidang Pemerintahan;
- 2; Sub Bagian Anggaran Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- 3; Sub Bagian Anggaran Bidang Pendidikan Dan Kesejahteraan

2; Bagian Perbendaharaan, membawahkan :

- 1; Sub Bagian perbendaharaan Bidang Pemerintahan
- 2; Sub Bagian Perbendaharaan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

- 3; Sub Bidang Perbendaharaan Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan

- 3; Bagian Pengelolaan Kas Daerah, membawahkan

- 1; Sub Bagian Penerimaan

- 2; Sub Bagian Pengeluaran

- 3; Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi

- 4; Bagian Akuntansi, membawahkan :

- 1; Sub Bagian Akuntansi bidang Pemerintahan

- 2; Sub Bagian Akuntansi Bidang Ekonomi dan Pembangunan

- 3; Sub Bagian Akuntansi bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat

- 5; Bagian Evaluasi dan Pengendalian PPBD Kab/Kota, membawahkan :

- 1; Sub Bagian evaluasi dan pengendalian APBD Kab/Kota Wilayah Timur;

- 2; Sub bagian evaluasi dan pengendalian APBD Kab/Kota wilayah Barat

- 3; Sub Bagian Tata Usaha Biro

c; **Biro Hubungan Masyarakat**, membawahkan :

1; Bagian Publikasi, membawahkan :

- 1; Sub bagian Penyiapan Naskah sambutan dan Makalah
- 2; Sub bagian Publikasi dan Penerbitan;
- 3; Sub bagian Peliputan

2; Bagian Pengelolaan Informasi, membawahkan :

- 1; Sub Bagian Pengelolaan Sistem Informasi ;
- 2; Sub Bagian Pengelolaan Data dan Informasi;
- 3; Sub Bagian Tata Usaha Biro .

3; Bagian Analisis Media dan Informasi, membawahkan :

- 1; Sub bagian Analisis Berita;
- 2; Sub Bagian Pengelolaan Pendapat Umum;
- 3; Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan

d; **Biro Umum**, membawahkan :

1; Bagian Rumah Tangga, membawahkan :

- 1; Sub Bagian Urusan Dalam;
- 2; Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan
- 3; Sub Bagian Tata Usaha Gubernur;
- 4; Sub Bagian Tata Usaha Wakil Gubernur

2; Bagian Perlengkapan, membawahkan:

- 1; Sub Bagian Analisis Kebutuhan dan Inventarisasi Barang
- 2; Sub Bagian Pengadaan dan Distribusi Barang
- 3; Sub Bagian Tata Usaha Biro

3; Bagian Kesekretariatan, membawahkan :

- 1; Sub Bagian Keuangan Setda;
- 2; Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi
- 3; Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi

4; Bagian Protokol, membawahkan :

- 1; Sub Bagian Acara Protokoler
- 2; Sub Bagian Pelayanan Tamu
- 3; Sub Bagian Tata Usaha SEKDA

B; Sumber Daya Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan Setda Provinsi Jawa Tengah didukung sumberdaya antara lain :

a; Sumber Daya Manusia Aparatur

Jumlah personil Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 919 Pegawai Negeri Sipil (data PNS per Pebruari 2014), terdiri dari Eselon I.b 1 orang, Eselon II.a 4 orang, Eselon II.b 12 orang, Eselon III.a sebanyak 42 orang dan Eselon IV.a sebanyak 119

orang serta JFU 804 orang yang terdiri dari golongan I sebanyak 21 orang, golongan II sebanyak 149 orang, golongan III sebanyak 646 orang dan golongan IV sebanyak 103 orang yang rata-rata mempunyai pengetahuan dibidang pemerintahan, hukum, informatika, dan manajemen.

Secara rinci data PNS pada Biro-Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel II.1
Komposisi PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Kondisi Bulan Pebruari Tahun 2014

NO	Unit Kerja	Jenis Kelamin			Pendidikan						Golongan Kepangkatan				Jabatan/ Eselon				
		L	P	Jml	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	I	II	III	IV	I	II	III	IV	Jml
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Biro Tata Pemerintahan	27	14	41	0	0	2	4	22	13	0	0	30	11	0	1	4	10	15
2	Biro Otda dan Kerjasama	25	27	52	0	2	6	0	22	22	0	4	37	11	0	1	4	11	16
3	Biro Hukum	32	15	47	1	0	3	2	33	8	0	3	39	5	0	1	4	12	17
4	Biro Administrasi Pembangunan Daerah	32	14	46	3	0	5	2	20	16	0	6	31	9	0	1	3	9	13
5	Biro Perekonomian	29	18	47	0	0	6	0	24	17	0	2	37	8	0	1	3	6	10
6	Biro Produksi	28	23	51	1	0	9	3	26	12	0	4	38	9	0	1	3	8	12
7	Biro Bina Sosial	21	13	34	0	0	2	1	25	6	0	1	28	5	0	1	2	7	10
8	Biro Bina Mental	18	13	31	1	0	2	1	18	9	0	2	24	5	0	1	2	6	
9	Biro Organisasi dan kepegawaian	32	32	64	0	1	11	4	29	19	0	5	46	13	0	1	4	11	16
10	Biro Hubungan Masyarakat	66	56	122	0	3	21	6	68	24	1	8	105	8	0	1	3	14	18
11	Biro Keuangan	44	27	71	0	2	16	4	42	7	0	7	53	11	0	1	5	9	15
12	Biro Umum	204	109	313	22	32	145	21	74	19	20	107	178	8	0	1	4	12	17
JUMLAH		558	361	919	28	40	228	48	403	172	21	149	646	103	0	12	42	119	168

Sumber : Biro ORPEG Setda Prov. Jateng

b; **Sarana dan Prasarana Penunjang**

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Setda Provinsi Jawa Tengah diperlukan sarana dan prasarana penunjang. Adapun sarana dan prasarana penunjang/aset yang dimiliki Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak, sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut :

Tabel II.2
Rekapitulasi Aset Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Kondisi Bulan Nopember Tahun 2013

NO	KODE	NAMA BARANG	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
I	01	TANAH	30
II	PERALATAN MESIN		
	02	Alat-lat Besar	11
	03	Alat-alat Angkut	364
	04	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	1
	05	Alat-alat Pertanian/Peternakan	-
	06	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	19.400
	07	Alat-alat Studio dan Komunikasi	2.060
	08	Alat-alat Kodokteran	39
	09	Alat-alat Laboratorium	1
	10	Alat-alat Metrologi dan Geofisika	2
	11	Alat-alat Persenjataan dan Keamanan	8
	12	Alat-alat Olah Raga	17
III	GEDUNG DAN BANGUNAN		
	13	Bangunan Gedung	40
	14	Monumen	-
IV	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
	15	Jalan dan Jembatan	-
	16	Bangunan Air dan Irigasi	-
	17	Instalasi	58
	18	Jaringam	-
V	ASET TETAP LAINNYA		
	19	Buku Perpustakaan	12.499

	20	Barng Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	51
	21	Hewan Ternak dan Tumbuhan	-
	Jumlah Total Aset		34.581

Sumber : Biro Umum Setda Prov. Jateng

C; Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Kinerja pelayanan SKPD merupakan capaian kinerja SKPD yang diperoleh dari perbandingan antara capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang semula ditargetkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut.

Berikut ini disampaikan capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pelaksanaan program pembangunan selama lima tahun (2008-2013) sebagai berikut :

Tabel II.3
Realisasi Capaian Kinerja Program Pembangunan di
Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2013

No	Program/ Indikator	Kondisi Awal Renstra (2008)	REALISASI CAPAIAN						Kondisi Akhir Renstra (2013)
			Th. 2008	Th. 2009	Th. 2010	Th. 2011	Th. 2012	Th. 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I. Program Pemerintahan Umum									
1	Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang ber ISO	3	3	3	4	2	46	12	58
2	Jumlah UPP yang melakukan pengukuran IKM	1	1	1	4	-	69	46	104
3	Pembangunan Batas Wilayah	0	0	0	5 (Jtng-DIY)	0	0	0	5 (Jtng-DIY)
II Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah									
1	Jumlah Fasilitasi Pemilukada Kab/Kota	7	7	0	17	7	4	7	35

II	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah								
1	Jumlah Kerjasama Daerah	47	47	50	117	99	196	177	177
III	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan								
1	Jumlah Perda yang disusun	7	7	9	6	7	9	6	40
2	Sosialisasi Produk Hukum	4	4	2	2	2	1	4	13
IV	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah								
1	Opini BPK tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Selanjutnya secara rinci, capaian kinerja pelayanan di lingkungan Setda Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2008-2013, diuraikan capaian kinerja setiap Biro-Biro di lingkungan Setda Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

a; **Capaian Kinerja Bidang Tata Pemerintahan**

Capaian kinerja bidang Tata Pemerintahan dalam kurun waktu Tahun 2008 – 2013 antara lain sebagai berikut :

- 1; Terlaksananya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- 2; Terlaksananya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas pemerintahan umum.
- 3; Terlaksananya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pemerintahan desa / kelurahan.
- 4; Terlaksananya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan catatan sipil.
- 5; Terlaksananya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas bidang pertanahan.
- 6; Terlaksananya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas bidang ketentraman dan ketertiban .

7; Terlaksananya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas penataan wilayah perbatasan .

b; **Capaian Kinerja Bidang Otonomi Daerah dan Kerjasama**

Capaian kinerja bidang Otonomi Daerah dan Kerjasama dalam kurun waktu Tahun 2008 – 2013 antara lain sebagai berikut:

- 1; Terlaksananya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pemilihan kepala daerah (bupati/walikota) di Jawa Tengah.
- 2; Terlaksananya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas pergantian antar waktu Anggota DPRD kab./kota.
- 3; Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Prov. Jawa Tengah Tahun 2008-2013
- 4; Terlaksananya fasilitasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 -2013.
- 5; Terlaksananya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daerah .
- 6; Terlaksananya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan kerjasama dengan pihak luar negeri .

c; **Capaian Kinerja Bidang Hukum**

Capaian kinerja bidang Hukum, dalam kurun waktu Tahun 2008 – 2013 antara lain sebagai berikut :

- 1; Tersusunnya rancangan peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 2; Tertanganinya perkara perdata dan tata usaha negara yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- 3; Tertanganinya perkara masyarakat yang tidak mampu berperkara di lembaga peradilan melalui Lembaga Bantuan

Hukum yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

- 4; Terfasilitasi dan terevaluasinya kegiatan RANHAM Kabupaten/Kota.
- 5; Terlayani pengguna informasi hukum secara cepat dan akurat.
- 6; Terwujudnya pemahaman, kepatuhan dan kesadaran hukum bagi aparat dan masyarakat di Jawa Tengah
- 7; Terevaluasinya rancangan peraturan daerah kabupaten/kota.
- 8; Terklarifikasinya peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota.
- 9; Terlaksananya pemantauan produk hukum daerah kabupaten/kota.
- 10; Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penyusunan peraturan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- 11; Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan segketa hukum .

d; **Capaian Kinerja Bidang Administrasi Pembangunan**

Capaian kinerja bidang Administrasi Pembangunan, dalam kurun waktu Tahun 2008 – 2013 antara lain adalah sebagai berikut :

- 1; Terlaksananya pengendalian pelaksanaan APBD Provinsi Jateng pada 59 SKPD maupun bantuan keuangan kepada 35 kabupaten/kota .
- 2; Terlaksananya pelaporan kegiatan pada SKPD dan kabupaten/kota .
- 3; Tersusunnya LKPJ Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2008-2012 .

e; **Capaian Kinerja Kinerja Bidang Ekonomi**

Capaian kinerja bidang Ekonomi, dalam kurun waktu Tahun 2008 – 2013 antara lain sebagai berikut :

- 1; Terlaksananya koordinasi BUMD, sosialisasi program PKBL-BUMN, KUR, KKPE, KUPS, Lembaga Keuangan Mikro, permodalan bagi UMKM di Jateng
- 2; Terlaksananya pembinaan, monev BUMD, MP3I, promosi bidang penanaman modal dan UKM bidang pariwisata serta promosi produk unggulan.
- 3; Terlaksananya pengumpulan informasi IHT Cukai ilegal dan sosialisasi ketentuan bidang cukai.
- 4; Terlaksananya rakor BUMD, Ekuinda, Raskin, MPU, Kerajinan Daerah, Pemantauan Komoditas Strategis TPPH dan pemantauan penyaluran raskin.
- 5; Terlaksananya Posko Terpadu Lebaran, Natal Tahun berjalan dan Tahun Baru Berikutnya
- 6; Terlaksananya RUPS dan kajian BUMD .

f; **Capaian Kinerja Bidang Bina Produksi**

Capaian kinerja bidang Bina Produksi, dalam kurun waktu Tahun 2008 – 2013 antara lain sebagai berikut :

- 1; Terlaksananya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas bidang pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan .
- 2; Terlaksananya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas bidang peternakan, perikanan dan kelautan.
- 3; Terlaksananya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas bidang kehutanan .
- 4; Terlaksananya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup .

- 5; Terlaksananya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas bidang energi dan sumber daya mineral .

g; **Capaian Kinerja Bidang Bina Sosial**

Capaian kinerja bidang Bina Sosial, dalam kurun waktu Tahun 2008 – 2013 antara lain sebagai berikut :

- 1; Terlaksananya pembinaan dan monitoring bagi lembaga sosial dan lembaga sosial lainnya.
- 2; Terfasilitasi dan terkoordinasinya dan terevaluasinya penanggulangan bencana 35 kab/kota di Jawa Tengah.
- 3; Terlaksananya koordinasi dan sinergitas program/kegiatan bidang kesehatan antara provinsi dengan kab/kota dan stakeholder.
- 4; Terfasilitasinya stakeholder terkait ketenagakerjaan tingkat provinsi dan kabupaten kota se-Jawa Tengah dalam upaya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, penanganan TKI bermasalah, serta koordinasi bidang ketenagakerjaan.
- 5; Tersosialisasinya pemahaman mengenai apa dan bagaimana program CSR (Corporate Social Responsibility) dapat sebagai bagian dari peran dunia usaha dalam mendukung program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota khususnya penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di Jawa Tengah.
- 6; Terlaksananya koordinasi dan sinergitas program penanggulangan kemiskinan antar Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Stakeholder terkait.

- 7; Terlaksananya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana.

h; **Capaian Kinerja Bidang Bina Mental**

Capaian kinerja bidang Bina Mental, dalam kurun waktu Tahun 2008 – 2013 antara lain sebagai berikut :

- 1; Terlaksananya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas fasilitasi bidang keagamaan .
- 2; Terlaksananya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas bidang seni dan budaya.
- 3; Terlaksananya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas bidang pendidikan.
- 4; Terlaksananya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas bidang pemuda dan olah raga .

i; **Capaian Kinerja Bidang Organisasi dan Kepegawaian**

Capaian kinerja bidang Organisasi Dan Kepegawaian, dalam kurun waktu Tahun 2008 – 2013 antara lain sebagai berikut :

- 1; Tersusunnya kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
- 2; Terfasilitasinya penataan kelembagaan perangkat daerah di 35 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
- 3; Tersusunnya penataan kelembagaan non struktural Provinsi di Jawa Tengah.

- 4; Tesusunnya Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Penyusunan Formasi PNS pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 5; Terfasilitasinya pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan penyusunan formasi PNS di 35 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
- 6; Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP) Provinsi Jawa Tengah dan LAKIP SKPD Provinsi Jawa Tengah.
- 7; Tersusunnya Penetapan Kinerja (PK) Gubernur Jawa Tengah dan Penetapan Kinerja Kepala SKPD Provinsi Jawa Tengah.
- 8; Tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan RKT SKPD Provinsi Jawa Tengah.
- 9; Tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan IKU SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013.
- 10; Terfasilitasinya penyusunan LAKIP, PK, dan RKT di 35 Pemerintah kabupaten/ kota se Jawa Tengah.
- 11; Tersusunnya Laporan Koordinasi dan Monitoring (Kormonev) Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Jawa Tengah.
- 12; Terlaksananya Forum Komunikasi Aparatur Pemerintah Daerah di lingkungan SKPD Provinsi Jawa Tengah dan 35 Pemerintah kab./kota se Jawa Tengah.
- 13; Terlaksananya pengembangan budaya kerja aparatur di SKPD Provinsi Jawa Tengah dan terfasilitasinya pelaksanaan pengembangan budaya kerja di 35 kab./kota se Jawa Tengah.
- 14; Tersusunnya Draf Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 dan terfasilitasinya

penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi pemerintah kab./kota se Jawa Tengah.

- 15; Tersusunnya pedoman tata naskah dinas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan terfasilitasinya penyusunan tata naskah dinas di 35 Pemerintah kab./kota se Jawa Tengah.
- 16; Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) di SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan terfasilitasinya penyusunan SOP di 35 Pemerintah Kab./Kota se Jawa Tengah .
- 17; Tersusunnya Pola Hubungan Kerja di lingkungan SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan terfasilitasinya penyusunan pola hubungan kerja di pemerintah kab./ kota se Jawa Tengah.
- 18; Tersusunnya Standar Pelayanan Publik (SPP) di Unit Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan terfasilitasinya penyusunan SPP di pemerintah kab./ kota se Jawa Tengah.
- 19; Terlaksananya pendampingan Sistem Manajemen Mutu (SMM) di Unit Pelayanan Publik (UPP) Provinsi Jawa Tengah.
- 20; Terlaksananya sertifikasi ISO pada Unit Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah sebanyak 29 UPP.
- 21; Terlaksananya pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah sebanyak 46 UPP.
- 22; Terevaluasinya kinerja Unit Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 35 Pemerintah Kab./Kota se Jawa Tengah.
- 23; Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Setda Provinsi Jawa Tengah.
- 24; Terfasilitasinya Pengembalian iuran Bapertarum-PNS Provinsi Jawa Tengah.

25; Tersalurnya pemberian kesejahteraan PNS bidang Kesehatan bagi PNS Provinsi Jawa Tengah.

26; Terfasilitasinya pelaksanaan pemberian tali asih bagi PNS Provinsi Jawa Tengah yang akan memasuki purna tugas .

j; **Capaian Kinerja Bidang Keuangan**

Capaian kinerja bidang Keuangan, dalam kurun waktu Tahun 2008 – 2013 antara lain sebagai berikut :

1; Tersusunnya Perda dan Pergub APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2008 -2013 .

2; Tersusunnya pedoman penatausahaan APBD .

3; Terlaksananya pembinaan penatausahaan keuangan kepada seluruh SKPD Provinsi Jawa Tengah.

4; Terlaksananya evaluasi Raperda APBD, perubahan APBD kab./kota dan pertanggungjawaban APBD kab./kota.

5; Terlaksananya manajemen Kas Daerah.

6; Tercapainya pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran SKPD.

7; Terwujudnya dan terlaksannya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada 7 RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

k; **Capaian Kinerja Bidang Hubungan Masyarakat**

Capaian kinerja bidang Hubungan Masyarakat, dalam kurun waktu Tahun 2008 – 2013 antara lain sebagai berikut :

1; Terlaksananya pelaksanaan tugas penyusunan naskah sambutan pimpinan (Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah) .

- 2; Terlaksananya publikasi dan penerbitan pelaksanaan tugas pimpinan daerah .
- 3; Terlaksananya pengelolaan sistem informasi daerah .
- 4; Terlaksananya pelaksanaan tugas penyusunan analisis media .
- 5; Terlaksananya pengelolaan pendapat umum .

l; **Capaian Kinerja Bidang Umum**

Capaian kinerja bidang Umum, dalam kurun waktu Tahun 2008 – 2013 antara lain adalah sebagai berikut :

- 1; Terlaksananya pengelolaan urusan dalam .
- 2; Terlaksananya pemenuhan rumah tangga pimpinan.
- 3; Terlaksananya penyelenggaraan ketatausahaan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- 4; Terlaksananya penyusunan analisis dan kebutuhan barang di lingkungan Setda Prov. Jateng .
- 5; Terlaksananya pengelolaan arsip di lingkungan Setda Prov. Jawa Tengah .
- 6; Terlaksananya pemenuhan protokoler dan pelayanan tamu pimpinan .

D; **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Setda Prov. Jawa Tengah**

Tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh beberapa perubahan lingkungan strategis internal maupun eksternal dalam skala regional, nasional dan internasional. Perubahan-perubahan lingkungan strategis internal maupun eksternal dalam skala regional, nasional dan internasional tersebut saling terkait memberikan pengaruh

terhadap rencana strategis dan orientasi pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018.

a; **Tantangan Bagi Pengembangan Pelayanan di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah**

1; **Tatangan Pengembangan Pelayanan Bidang Tata Pemerintahan :**

- 1; Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan sehingga menuntut untuk pengembangan kapasitas pemerintahan desa/ kelurahan
- 2; Semakin meningkatnya konflik pertanahan di daerah, sehingga menuntut adanya kebijakan dan penyelesaian yang tepat dan komprehensif.
- 3; Semakin meningkatnya aspirasi masyarakat akan pemekaran wilayah, sehingga memerlukan adanya penataan wilayah sesuai dengan kebutuhan lokal.

2; **Tatangan Pengembangan Pelayanan Bidang Otonomi dan Kerjasama :**

- 1; Semakin meningkatnya kompetisi antar daerah, yang menuntut adanya inovasi dan kreativitas dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 2; Semakin seringnya terjadi konflik pemilihan kepala daerah, sehingga menuntut adanya profesionalisme dalam penyelenggaraan pilkada .
- 3; Semakin terbatasnya sumber daya daerah, sehingga menuntut peningkatan kerjasama antar daerah, antar wilayah dan antar negara.

3; **Tatangan Pengembangan Pelayanan Bidang Hukum :**

- 1; Semakin meningkatnya pendidikan masyarakat, sehingga mempengaruhi pula terhadap kepastian hukum dalam setiap tata kelola pemerintahan.
- 2; Meningkatnya harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari unsur KKN.
- 3; Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pemenuhan HAM
- 4; Tuntutan terhadap pelayanan dokumentasi dan informasi hukum yang cepat dan akurat .
- 5; Meningkatnya kebutuhan masyarakat tidak mampu terhadap permohonan bantuan hukum dalam berperkara di lembaga peradilan.

4; **Tatangan Pengembangan Pelayanan Bidang Administrasi Pembangunan Daerah :**

- 1; Menguatnya tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan .
- 2; Keterbatasan personil baik dari jumlah maupun kapasitas didalam menyusun dan melaksanakan manajemen pemerintah daerah .
- 3; Lemahnya koordinasi baik sektoral maupun antar daerah .
- 4; Belum tersedianya sistem dan prosedur kerja yang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi.

5; **Tantangan Pengembangan Pelayanan Bidang Perekonomian :**

- 1; Terbatasnya kemampuan Lembaga Keuangan Mikro Non Bank, Non Koperasi dan UMKM untuk memenuhi kebutuhan modal usaha maupun melakukan persiapan menuju berbadan hukum
 - 2; Menguatnya tuntutan kualitas SDM pegrajin dalam kemampuan inovasi, desain dan pemanfaatan teknologi produk maupun informasi.
 - 3; Lemahnya akses kepada lembaga permodalan dan promosi pemasaran serta manajemen usaha yang masih sederhana.
 - 4; Meningkatnya jumlah pemudik ke Jawa Tengah
 - 5; Lemahnya daya dukung sarana dan prasarana jalan alternatif masih kurang mendukung dalam angkutan lebaran.
 - 6; Rendahnya diversifikasi produk wisata.
 - 7; Terbatasnya jumlah obyek wisata.
 - 8; Kurangnya sinergi program pengembangan pariwisata antar Pemprov, Kab/Kota serta stakeholders di bidang pariwisata
 - 9; Rendahnya peluang investasi yang ditawarkan oleh Jawa Tengah.
- 6; **Tantangan Pengembangan Pelayanan Bidang Produksi Daerah :**
- 1; Tuntutan adanya peningkatan koordinasi antara pusat dan daerah dalam rangka mensinergikan kebijakan bidang pertanian.
 - 2; Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pangan, sehingga diperlukan peningkatan kinerja bidang

pertanian melalui peningkatan produksi dan keanekaragaman pangan .

- 3; Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan energi, sehingga dibutuhkan peningkatan penghematan dan pengelolaan energi baru terbarukan.

7; **Tantangan Pengembangan Pelayanan Bidang Sosial:**

- 1; Masih banyaknya penduduk miskin di Jawa Tengah, sehingga membutuhkan kebijakan dan penanganan secara tepat dan terintegrasi antar *stakeholder* yang terkait.
- 2; Masih tingginya angka pengangguran di Jawa Tengah, sehingga membutuhkan penanganan yang terintegrasi dan lintas sektoral secara tepat.
- 3; Semakin meningkatnya kasus korban kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak, sehingga membutuhkan perhatian untuk pengambilan kebijakan dan penanganan secara tepat dan terintegrasi.
- 4; Masih tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial di Jawa Tengah, sehingga membutuhkan penanganan secara tepat dan terkoordinir agar menghasilkan kinerja yang optimal

8; **Tantangan Pengembangan Pelayanan Bidang Bina Mental :**

- 1; Meningkatnya kebutuhan akan kerukunan umat beragama di Jawa Tengah.
- 2; Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap jiwa nasionalisme bagi tokoh – tokoh agama.
- 3; Menurunnya minat masyarakat dan generasi muda terhadap nilai – nilai budaya asli daerah.

- 4; Masih kurangnya perhatian berbagai pihak terhadap kelangsungan kebudayaan asli daerah.
 - 5; Meningkatnya ekstensi masyarakat Jawa Tengah terhadap peran pemuda terhadap kemajuan Provinsi Jateng.
 - 6; Meningkatnya ekstensi masyarakat Jawa Tengah terhadap prestasi bidang olahraga di tingkat nasional maupun internasional.
 - 7; Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pentingnya pendidikan di segala lini kehidupan.
 - 8; Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan perbaikan sarana prasarana ibadah, tempat pendidikan agama.
 - 9; Meningkatnya kebutuhan masyarakat atas fasilitasi kegiatan kebudayaan kesenian dan olahraga.
- 9; **Tantangan Pengembangan Pelayanan Bidang Organisasi :**
- 1; Adanya tuntutan internasional untuk menerapkan *good governance dan clean government*.
 - 2; Semakin meningkatnya tuntutan profesionalisme dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
 - 3; Adanya tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik dari masyarakat.
- 10; **Tatangan Pengembangan Pelayanan Bidang Keuangan :**
- 1; Terciptanya aturan tentang Perda dan Pergub APBD, perubahan dan pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu.
 - 2; Pentingnya pembinaan yang berkelanjutan terhadap SDM pada SKPD yang selalu berganti ganti .
 - 3; Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas anggaran daerah.

- 4; Meningkatkan pelayanan fungsi BLUD.
- 5; Meningkatkan profesionalitas sumber daya aparatur pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada kinerja.

11; **Tantangan Pengembangan Pelayanan Bidang Kehumasan :**

- 1; Adanya tuntutan masyarakat yang semakin kuat untuk memperoleh informasi publik sejalan dengan berlakunya Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 2; Adanya regulasi keterbukaan pers memerlukan kontrol terhadap konten media untuk mewujudkan pemberitaan yang obyektif, berimbang dan bertanggung jawab.
- 3; Adanya sifat kritis masyarakat memerlukan efektivitas penyediaan, pelayanan dan pengelolaan informasi.

12; **Tatangan Pengembangan Pelayanan Bidang Umum**

- 1; Adanya tuntutan pelayanan yang maksimal untuk mencapai hasil yang memuaskan
- 2; Tuntutan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor yang memadai.

b; **Peluang Bagi Pengembangan Pelayanan di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah**

1; **Peluang Pengembangan Pelayanan Bidang Tata Pemerintahan :**

- 1; Terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, intensitas pelaksanaan tanah kas desa sesuai Permendagri No.4 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pengelolaan Kekayaan Desa serta Penyelenggaraan urusan pertanahan sesuai kewenangan provinsi.

- 2; Koordinasi pembinaan dan pengawasan Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan efektivitas penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah.
- 3; Adanya dukungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) dan pelimpahan kewenangan Bupati/ Walikota kepada Camat.
- 4; Adanya komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan fasilitas kepada pemerintah kabupaten/kota guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pelayanan prima kepada masyarakat.

2; **Peluang Pengembangan Pelayanan Bidang Otonomi Daerah dan Kerjasama :**

- 1; Adanya komitmen pimpinan daerah untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan inovasi daerah sesuai dengan potensi dan keunggulan masing-masing daerah.
- 2; Adanya komitmen Gubernur, untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan di Jawa Tengah .
- 3; Adanya komitmen pimpinan daerah untuk senantiasa meningkatkan hubungan kerjasama baik dalam dan luar negeri.

3; **Peluang Pengembangan Pelayanan Bidang Hukum :**

- 1; Adanya komitmen pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mempunyai produk hukum daerah Provinsi Jawa

Tengah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan lainnya, kepentingan umum dan sesuai dengan harapan masyarakat

2; Kondisi dan situasi wilayah Jawa Tengah yang relatif stabil dan kondusif.

3; Adanya komitmen Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah untuk menyelenggarakan bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu secara profesional melalui penyusunan Perda Provinsi Jawa Tengah tentang Bantuan Hukum.

4; **Peluang Pengembangan Pelayanan Bidang Administrasi pembangunan Daerah :**

1; Komitmen dari masing-masing pimpinan SKPD dalam mendukung mekanisme pengendalian dan pelaporan secara efektif.

2; Tersedianya teknologi informasi yang memadai dalam mendukung pengendalian dan pelaporan yang lebih optimal.

3; Terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa yang lebih akuntabel melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jateng.

5; **Peluang Pengembangan Pelayanan Bidang Perekonomian :**

1; Adanya komitmen pemerintah untuk melaksanakan peningkatan kemampuan SDM, Lembaga Keuangan Mikro, modal usaha

- 2; Adanya komitmen pemerintah untuk melaksanakan peningkatan koordinasi dan fasilitasi guna mensinergikan kegiatan di Prov. dan kab/kota.
 - 3; Adanya komitmen pemerintah untuk mendorong peningkatan berusaha dan bekerja, jumlah usaha kecil menengah serta menarik investor.
 - 4; Adanya komitmen pemerintah dan masyarakat untuk mendorong kepada perusahaan daerah selalu meningkatkan pendapatan usahanya.
 - 5; Kompetitifnya pelaku usaha pada kegiatan – kegiatan yang dikelola oleh BUMD.
 - 6; Target PAD dari deviden BUMD yang semakin meningkat.
- 6; **Peluang Pengembangan Pelayanan Bidang Produksi Daerah :**
- 1; Adanya komitmen Gubernur untuk mewujudkan Jawa Tengah dapat berdikari dibidang pangan dan energi.
 - 2; Tersedianya lahan pertanian yang potensial dan produktif untuk dikembangkan dalam rangka mewujudkan Jawa Tengah berdikari di bidang pangan.
 - 3; Adanya potensi energi baru terbarukan yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- 7; **Peluang Pengembangan Pelayanan Bidang Bina Sosial :**
- 1; Terbentuknya BPBD di 25 Kab / Kota berdasarkan Perda sesuai amanat UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana akan mempermudah distribusi bantuan bencana dari BNPB kepada BPBD di Kab / Kota.
 - 2; UU No. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, PP No. 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial, dan Permendagri No. 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komda lansia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam penanganan lanjut usia di daerah.

- 3; Adanya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) Provinsi Jawa Tengah yang bertugas melakukan sosialisasi dan percepatan sistem kompetensi, fasilitasi / koordinasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji kompetensi, dan membangun infrastruktur SDM Kompetensi.
- 4; Adanya peraturan yang mendukung pelaksanaan program CSR, seperti UU Perseroan Terbatas.
- 5; Adanya Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan kemiskinan.

8; **Peluang Pengembangan Pelayanan Bidang Bina Mental :**

- 1; Tersedianya lembaga-lembaga pendidikan agama di Provinsi Jawa Tengah.
- 2; Adanya berbagai pemeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Provinsi Jawa Tengah.
- 3; Beragamnya budaya daerah yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah.
- 4; Banyaknya ormas/lembaga/perkumpulan bidang kesenian, pemuda dan olahraga yang ada di Jawa Tengah.
- 5; Tersedianya sekolah – sekolah dari SD, SMP, SMU, dan Perguruan Tinggi di Provinsi Jawa Tengah.
- 6; Adanya komitmen Gubernur Jawa Tengah terhadap perkembangan bidang pendidikan dan seni budaya di Jawa Tengah.

- 7; Peluang Pengembangan Pelayanan Bidang Bina Sosial.
- 8; Semakin meningkatnya tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat.
- 9; **Peluang Pengembangan Pelayanan Bidang Organisasi :**
 - 1; Adanya kebijakan dan komitmen Gubernur untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan “mboten ngapusi lan mboten korupsi.
 - 2; Adanya tuntutan global untuk mewujudkan adanya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik di semua lini pemerintahan
- 10; **Peluang Pengembangan Pelayanan Bidang Keuangan:**
 - 1; Adanya komitmen Gubernur untuk mewujudkan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
 - 2; Semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga cukup membantu dalam pengelolaan administrasi keuangan daerah.
- 11; **Peluang Pengembangan Pelayanan Bidang Kehumasan :**
 - 1; Adanya komitmen Gubernur Jawa Tengah untuk semakin meningkatkan keterbukaan dan akses informasi kepada masyarakat .
 - 2; Semakin meningkatnya sarana dan prasarana telekomunikasi yang dapat menunjang efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat .
- 12; **Peluang Pengembangan Pelayanan Bidang Umum :**
 - 1; Tercapainya kondisi sarana dan prasarana gedung kantor Gubernur yang memadai .

- 2; Terlaksananya proses pengadaan barang/ peralatan kantor yang akuntabel melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Tengah.
- 3; Tercapainya pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang cepat, lancar dan bertanggungjawab.